

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas menghimpun penerimaan negara yang terus meningkat untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak di setiap wilayah Kantor Pelayanan Pajak maka perlu fungsi pengawasan untuk mengetahui lebih dalam Wajib Pajak yang perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dalam rangka pengawasan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk memberikan gambaran proses penyusunan dan pemanfaatan DPP, implementasi pemanfaatan DPP, dan kendala yang dialami KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan DPP telah dilaksanakan sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Secara keseluruhan, efektivitas realisasi pemanfaatan DPP tahun 2022 masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini juga didukung hasil pendekatan berdasarkan teori implementasi Edwards III (1980) bahwa keempat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi implementasi DPP telah terpenuhi sehingga implementasi DPP dapat berjalan efektif. Terdapat kondisi yang menjadi kendala dalam proses pemanfaatan DPP yang dilakukan oleh KPP Pratama Badung Utara antara lain adaptasi kebijakan saat awal terbit, kompetensi Sumber Daya Manusia, ketersediaan dan validitas data yang kurang memadai, sikap WP dan keleluasaan penyusunan DPP.

Kata kunci: *efektivitas, Pengawasan, Implementasi, Pajak*

Abstract

The Directorate General of Taxes has the task of collecting ever-increasing state revenues to support the State Revenue and Expenditure Budget in order to realize state goals. In increasing tax revenue in each area of the Tax Service Office (KPP), it is necessary to have a supervisory function to find out more about the taxpayers who need to be examined. This study aims to determine the level of effectiveness of the use of the Priority Supervision List (DPP) in the context of supervising taxpayers to increase tax revenues at KPP Pratama Badung Utara. The analytical method used is qualitative analysis to provide an overview of the process of preparing and utilizing the DPP, implementing the utilization of the DPP, and the constraints experienced by KPP Pratama Badung Utara. The results of the research show that the DPP preparation process has been carried out in accordance with SE-05/PJ/2022. Overall, the effectiveness of the realization of DPP utilization in 2022 is in the very effective category. This is also supported by the results of an approach based on Edwards III's (1980) implementation theory that the four factors that are interconnected and influence DPP implementation have been fulfilled so that DPP implementation can run effectively. There are conditions that become obstacles in the process of utilizing the DPP carried out by the KPP Pratama Badung Utara, including policy adaptation at the time of publication, competence of Human Resources, availability and validity of inadequate data, attitude of the WP and the flexibility of preparing the DPP.

Keywords: effectiveness, Supervision, Implementation, Tax